

IN TRAY SIMULATION

ASSESSMENT CENTER

BADAN PUSAT STATISTIK RI 2025

Simulasi ini dikembangkan dari kasus operasional sehari-hari yang kerap ditemui pada instansi pemerintah, yang semata-mata hanya digunakan sebagai salah satu *tools* dari *assessment centre*. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk keperluan ilmiah semata dan bukan untuk menggambarkan kemampuan atau ketidakmampuan institusi maupun pribadi yang bersangkutan dalam mengerjakan kegiatan institusional.

**Nama, peristiwa, waktu, tempat dan kronologis kejadian hanyalah
suatu rekayasa.**

Petunjuk Asesi

Instruksi untuk Peserta

1. Baca dan pahami skenario utama.
2. Urutkan dokumen sesuai prioritas.
3. Berikan instruksi kerja untuk bawahan sesuai tupoksi dengan tepat.
4. Mengisi lembar disposisi
5. Tulis tanggapan yang relevan.

Prolog

Anda adalah seorang **Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Daerah X**. Dalam peran ini, Anda bertanggung jawab untuk mengelola berbagai dokumen yang masuk, memastikan setiap keputusan diambil dengan tepat, menentukan prioritas yang sesuai, serta mendisposisikan dokumen kepada pihak terkait secara efektif.

Dalam simulasi ini, Anda akan dihadapkan pada sejumlah dokumen operasional yang membutuhkan analisis mendalam. Tugas Anda adalah memastikan bahwa setiap tindakan yang Anda ambil mencerminkan kompetensi seorang Pengawas, seperti kemampuan mengambil keputusan strategis, menyusun prioritas berdasarkan urgensi, serta memastikan alur kerja berjalan dengan lancar sesuai kebijakan instansi.

Informasi Latar Belakang

Dinas Perhubungan (Dishub) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan sistem transportasi di suatu daerah. Peran utamanya meliputi pengelolaan lalu lintas, angkutan umum, infrastruktur transportasi, serta keselamatan dan keamanan transportasi.

Sebagai Kepala Dinas Perhubungan di Daerah X, Anda akan memimpin berbagai fungsi penting, termasuk:

- **Perumusan Kebijakan:** Menyusun kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
- **Perencanaan dan Pengendalian:** Merencanakan dan mengendalikan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta pengembangan transportasi.

- **Pembinaan dan Pengawasan:** Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional, serta mengawasi implementasi kebijakan di lapangan.
- **Pelayanan Publik:** Menyediakan layanan informasi dan aduan kepada masyarakat terkait transportasi, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
- **Koordinasi dan Kerja Sama:** Berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memastikan integrasi dan efektivitas sistem transportasi.

Visi: "Terwujudnya sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan, mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing."

Misi:

1. **Mengembangkan Infrastruktur Transportasi yang Berkualitas**
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, termasuk jalan, pelabuhan, terminal, dan fasilitas transportasi lainnya, untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan barang.
2. **Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Transportasi**
Meningkatkan standar keselamatan dan keamanan di seluruh moda transportasi, melalui pengawasan yang ketat, pelatihan, dan kampanye keselamatan bagi pengguna transportasi.
3. **Menyediakan Layanan Transportasi yang Efisien dan Terjangkau**
Menjamin tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan memprioritaskan aksesibilitas dan kenyamanan.
4. **Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi**
Meningkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional, guna menciptakan kebijakan transportasi yang terintegrasi dan efektif.

5. **Mendorong Pengembangan Transportasi Berkelanjutan**

Mendorong penerapan transportasi ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau, kendaraan listrik, dan pengelolaan transportasi yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

6. **Mengoptimalkan Pengelolaan Lalu Lintas dan Pengendalian Transportasi**

Menyusun dan menerapkan kebijakan pengendalian lalu lintas serta sistem manajemen transportasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

7. **Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang Profesional**

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai Dinas Perhubungan melalui pelatihan, pendidikan, serta pembinaan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Situasi Saat Ini

1. Hari ini adalah **Senin, 15 Januari 2025**, pukul 07.30. Anda baru saja kembali dari rapat daerah yang membahas strategi integrasi mobilitas transportasi umum daerah 2025. Pada pukul 12.00, Anda dijadwalkan menghadiri konferensi pers untuk mempublikasikan laporan tahunan Dinas Perhubungan Daerah X.
2. Setibanya di kantor, staf administrasi memberitahukan bahwa ada tumpukan dokumen penting yang memerlukan perhatian segera sebelum konferensi pers dimulai.
3. Anda memiliki waktu **60 menit** untuk menangani semua dokumen, mengambil keputusan, dan memberikan disposisi kepada tim Anda. Karena tenggat waktu yang ketat, Anda harus memprioritaskan dokumen berdasarkan urgensi dan dampaknya.
4. Anda tidak dapat mendelegasikan semua tugas, namun Anda dapat mengarahkan tim Anda untuk melaksanakan langkah-langkah yang jelas selama Anda berada di konferensi pers.

Tugas Peserta

1. Menangani masalah dan menyelesaikan tugas yang tertunda.

2. Mengurutkan dokumen berdasarkan prioritas (urgensi dan dampak terhadap organisasi).
3. Menyusun disposisi keputusan/tindakan untuk setiap dokumen.
4. Memberikan arahan yang jelas dan komprehensif dalam disposisi.
5. Memastikan semua persoalan telah ditangani dengan tepat.

SELAMAT BEKERJA!

KALENDER KEGIATAN

| Januari 2025 | | | | | | |
|--------------|-------|--------|------|-------|-------|-------|
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| JANUARI 2025 | | | | | | |
|--------------|-------|--------|------|-------|-------|-------|
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ringkasan Item In-Tray:
Nomor Dokumen dan Judul

| Dokumen | Judul Dokumen |
|----------------|--|
| 1. | Struktur Organisasi |
| 2. | Laporan Pelanggaran Etika oleh Pegawai |
| 3. | Proposal Kerja Sama Antar Divisi |
| 4. | Draft Surat untuk Pemangku Kepentingan |
| 5. | Laporan Insiden Data Bocor |
| 6. | Rancangan Program Inklusi Sosial |
| 7. | Permintaan Penyesuaian Target Kerja |
| 8. | Aduan Konflik Antar Divisi |
| 9. | Evaluasi Kinerja Triwulan |
| 10. | Undangan Seminar Motivasi |
| 11. | Permintaan Data Tidak Mendesak |

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan X



*Catatan: Posisi Anda saat ini berada pada area yang diberi sorotan warna kuning.

Kepada,
Yth. Bapak Sugeng Abadi
Direktur Jenderal Dinas Perhubungan X
Di Tempat

Perihal: Laporan Pelanggaran Etika oleh Pegawai

Dengan hormat,

Sehubungan dengan memo yang diterima dari Unit Pengawasan Internal mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu pegawai di bawah pengawasan saya, yaitu Ridwan Maulana, saya mengajukan laporan ini untuk menanggapi permasalahan yang telah terjadi.

Pada tanggal 7 Januari 2025, diketahui bahwa pegawai yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, yang melanggar pedoman kode etik perusahaan. Adapun fasilitas yang digunakan mencakup (perangkat komputer dan ruang kerja kantor) untuk kepentingan pribadi pada jam kerja. Pelanggaran ini tidak hanya berisiko terhadap integritas pribadi pegawai yang bersangkutan, namun juga dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Hal ini juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan norma profesional yang diharapkan dalam lingkungan kerja kita. Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan terhadap pegawai tersebut, yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan. Untuk menanggapi pelanggaran ini, saya menyarankan tindakan sebagai berikut:

1. Sanksi Teguran Tertulis

Sebagai bentuk peringatan pertama, saya merekomendasikan pemberian sanksi teguran tertulis kepada pegawai tersebut.

2. Pelatihan Ulang Kode Etik dan Penggunaan Fasilitas Kantor

Melakukan pelatihan ulang mengenai kode etik dan tata cara penggunaan fasilitas kantor guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

3. Pemantauan Kinerja Pegawai

Menetapkan pemantauan atas kinerja pegawai tersebut selama 6 bulan ke depan untuk memastikan pelaksanaan etika yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Demikian laporan ini saya buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Saya berharap agar tindakan yang diambil dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan profesional. Saya siap memberikan informasi lebih lanjut apabila diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Siti Saribanong

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Proposal Kerja Sama Antar Divisi

I. Latar Belakang Proyek

Pembangunan sistem integrasi data lintas divisi bertujuan untuk menghubungkan berbagai sumber data dari setiap divisi sehingga data dapat diakses dan digunakan secara efisien. Saat ini, setiap divisi memiliki sistem pengelolaan data yang berbeda, yang menyebabkan duplikasi data, kesalahan dalam pelaporan, dan lambatnya proses pengambilan keputusan karena data yang tidak sinkron.

II. Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Dengan sistem integrasi data, organisasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengakses dan mengelola data serta meningkatkan akurasi data yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

III. Ruang Lingkup Proyek

Divisi yang terlibat dalam proyek ini meliputi:

1. **Bidang Keuangan:** Mengintegrasikan data keuangan untuk laporan yang lebih akurat dan real-time.
2. **Bidang Infrastruktur:** Penggunaan data untuk perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur.
3. **Bidang Pengawasan dan Pengendalian:** Menggunakan data untuk audit dan pengawasan yang lebih efektif.
4. **Bidang TI dan Keamanan Data:** Menjamin bahwa sistem integrasi data aman dan memenuhi standar TI.
5. **Bidang Komunikasi dan Informasi:** Memastikan komunikasi data antar divisi berjalan lancar.

Rencana implementasi mencakup identifikasi kebutuhan setiap divisi, perancangan sistem yang sesuai, dan pelaksanaan uji coba sebelum peluncuran penuh.

IV. Manfaat Kerja Sama

Manfaat dari kerja sama ini adalah peningkatan efisiensi operasional dengan mengurangi duplikasi usaha dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan akses ke data yang terintegrasi dan akurat.

V. Sumber Daya yang Diperlukan

1. **Teknis:** Perangkat lunak integrasi data, server, dan infrastruktur jaringan.
2. **SDM:** Tim TI untuk implementasi dan pemeliharaan, serta pelatihan bagi pegawai di setiap divisi.
3. **Anggaran:** Biaya pengembangan sistem, pelatihan, dan pemeliharaan.

VI. Waktu dan Tahapan Proyek

Proyek diharapkan selesai dalam 6-12 bulan, tergantung pada kompleksitas dan ketersediaan sumber daya. Tahapan utama meliputi:

1. Analisis Kebutuhan
2. Perancangan Sistem
3. Pengembangan dan Uji Coba
4. Implementasi
5. Evaluasi dan Pemantauan

VII. Risiko dan Tantangan

1. **Risiko Teknis:** Gangguan teknis selama implementasi atau ketidakcocokan dengan sistem yang ada.
2. **Perubahan Manajemen:** Resisten terhadap perubahan dari staf yang sudah terbiasa dengan sistem lama.
3. **Keamanan Data:** Risiko kebocoran data atau akses yang tidak sah.

VIII. Tindak Lanjut dan Evaluasi

Pemantauan akan dilakukan secara berkala terhadap kinerja sistem integrasi dan pengumpulan umpan balik dari divisi yang terlibat. Evaluasi keberhasilan akan

menggunakan indikator kinerja utama (KPI) seperti pengurangan waktu pengelolaan data, peningkatan kecepatan akses data, dan kepuasan pengguna.

IX. Penutup

Proposal ini disusun untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kerja sama antar divisi untuk pembangunan sistem integrasi data. Dengan sinergi yang kuat antar divisi, diharapkan proyek ini dapat membawa manfaat yang signifikan bagi organisasi.

Hormat kami,

Ratna Dewi Sari

Kepala Bidang Infrastruktur

Kepada: Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Daerah X

Dari: Staff Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi

Perihal: Draft Surat Untuk Pemangku Kepentingan

Tanggal: 10 Januari 2025

Dengan hormat,

Kami dari Bidang Komunikasi dan Informasi dengan ini mengajukan permohonan dukungan tambahan anggaran untuk program prioritas pengembangan daerah yang sedang kami jalankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah kami guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah kami, seperti infrastruktur yang kurang memadai, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan utama dari surat ini adalah untuk memperoleh dukungan tambahan anggaran dari kementerian pusat. Dukungan ini sangat penting untuk mempercepat realisasi program prioritas dan memastikan pencapaian hasil yang signifikan.

Manfaat yang diharapkan dari program ini meliputi peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini juga akan meningkatkan daya saing daerah, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Kami mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembangunan jalan, renovasi sekolah, pelatihan tenaga pengajar, dan pengadaan fasilitas kesehatan. Dana ini akan dialokasikan secara transparan dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program.

Dukungan dari kementerian pusat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Selain dana tambahan, kami juga memohon dukungan kebijakan yang dapat mempermudah pelaksanaan program di lapangan.

Kami percaya bahwa dengan dukungan anggaran tambahan, program ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung visi nasional untuk pemerataan pembangunan. Berdasarkan data yang ada, peningkatan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah kami sangat mendesak dan program ini dapat menjadi solusi efektif.

Sebagai bentuk komitmen, kami akan menyiapkan laporan perkembangan program secara berkala dan mengadakan pertemuan koordinasi dengan kementerian untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan efektif. Kami berkomitmen untuk mengelola dana dengan baik dan mencapai target program yang telah ditetapkan.

Kami sangat berharap atas dukungan dan kerja sama dari Kementerian Terkait dalam mendukung program pengembangan daerah ini. Kami siap untuk berkolaborasi demi kesuksesan program yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Bayu Sasongko

Staff Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi

MEMO

Kepada: Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Daerah X

Dari: Kepala Bidang TI dan Keamanan Data

Perihal: Laporan Insiden Data Bocor

Tanggal: 14 Januari 2025

Sehubungan dengan insiden yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2025, kami informasikan bahwa tim IT telah mendeteksi potensi kebocoran data sensitif milik pemerintah daerah akibat serangan siber. Serangan ini diperkirakan berhasil menembus sistem keamanan dan mengakses data yang seharusnya terlindungi.

Tim IT segera mengambil tindakan dengan mengisolasi sistem yang terdampak guna mencegah penyebaran lebih lanjut dan mengamankan data yang tersisa. Investigasi mendalam telah dimulai untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dimanfaatkan dalam serangan ini.

Kebocoran ini berpotensi menyebabkan hilangnya data sensitif, kerugian reputasi, dan kemungkinan sanksi hukum. Gangguan operasional serta penurunan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah daerah juga menjadi risiko yang harus diperhatikan.

Langkah yang disarankan untuk menangani insiden ini meliputi:

1. Peningkatan protokol keamanan siber, termasuk penerapan enkripsi data dan multi-faktor autentikasi.
2. Pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman siber dan langkah-langkah mitigasi.
3. Memastikan semua sistem diperbarui dengan patch keamanan terbaru dan memperketat akses ke data sensitif.
4. Menyusun rencana komunikasi untuk memberi tahu pihak terkait tanpa menimbulkan panik.

Kami juga menyarankan agar dilakukan audit keamanan secara rutin, serta pengembangan kebijakan keamanan data yang lebih ketat, untuk memastikan kepatuhan semua staf.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk melindungi data sensitif dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Kami berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam menangani insiden ini serta memastikan keamanan data di masa mendatang.

Demikian memo ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Doni Damar

Kepala Bidang TI dan Keamanan Data

Kepada: Direktur Jenderal Dinas Perhubungan

Dari: Kepala Dinas Perhubungan

Perihal: Rancangan Program Inklusi Sosial

Tanggal: 10 Januari 2025

Rancangan Program Inklusi Sosial

Pembuka

Program Inklusi Sosial ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beragam dalam instansi pemerintah daerah. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin heterogen, penting bagi pemerintah untuk menciptakan ruang yang mengakomodasi berbagai perbedaan, baik itu perbedaan agama, etnis, gender, orientasi seksual, disabilitas, dan latar belakang sosial ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan budaya yang lebih menghargai keberagaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keharmonisan dalam masyarakat.

Isi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan pemerintahan dan sosial. Selain itu, program ini juga mendukung dan memperkuat keberagaman serta inklusi di instansi pemerintah daerah dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan saling menghargai antar individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat daerah.

Program ini ditujukan untuk dua kelompok utama. Pertama, pegawai instansi pemerintah daerah yang perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang beragam. Kedua, masyarakat umum, dengan tujuan untuk memberikan mereka ruang partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan

kegiatan sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah. Sasaran program ini mencakup keberagaman dalam berbagai bentuk, seperti agama, etnis, gender, orientasi seksual, disabilitas, serta latar belakang sosial ekonomi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini meliputi beberapa inisiatif utama. Pertama, akan diadakan pelatihan keberagaman untuk pegawai pemerintah daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keberagaman, serta untuk mengembangkan keterampilan komunikasi antar individu dengan latar belakang yang berbeda. Kedua, program ini juga akan menyelenggarakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk forum diskusi dan kelompok konsultasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbagi pandangan dan memberikan masukan terkait keputusan-keputusan publik. Selain itu, pendekatan interaktif dan berbasis pengalaman, seperti role-playing, simulasi, dan studi kasus, akan digunakan untuk memfasilitasi pemahaman tentang pengalaman hidup orang lain yang berasal dari latar belakang berbeda.

Evaluasi dari program ini akan dilakukan untuk mengukur keberhasilannya. Indikator keberhasilan meliputi tingkat partisipasi pegawai dalam pelatihan dan kegiatan keberagaman, perubahan dalam kualitas interaksi antar pegawai yang memiliki latar belakang berbeda, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum atau kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Evaluasi akan dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi langsung terhadap kegiatan yang berlangsung.

Penyebaran informasi tentang program ini akan dilakukan melalui saluran komunikasi internal seperti email, intranet, dan newsletter untuk pegawai, serta melalui media sosial, situs web pemerintah daerah, dan pengumuman publik untuk masyarakat umum. Berbagai format komunikasi, termasuk video, artikel, dan podcast, akan digunakan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program ini secara jelas dan menarik bagi semua pihak.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain ketidaksiapan sebagian pegawai atau masyarakat untuk menerima perubahan berbasis keberagaman, serta perbedaan persepsi terhadap inklusi sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang tersedia juga dapat mempengaruhi kelancaran implementasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan strategi komunikasi yang terbuka dan transparan, serta dukungan dari semua pihak terkait untuk memastikan kesuksesan program ini.

Rencana tindak lanjut program ini mencakup evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan dan efektivitas program. Pelatihan keberagaman akan dijadikan bagian dari program pengembangan pegawai yang berkelanjutan. Selain itu, tim khusus akan dibentuk untuk memastikan penerapan prinsip inklusi sosial dalam setiap kegiatan pemerintah daerah dan untuk memastikan bahwa kebijakan keberagaman dijalankan dengan baik.

Penutup

Program Inklusi Sosial ini merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih terbuka, adil, dan menghargai perbedaan. Dengan mengimplementasikan program ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan mampu bekerja sama secara produktif meskipun memiliki latar belakang yang beragam. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung keberagaman dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

MEMO

Kepada: Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Daerah X

Dari: Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur

Perihal: Permintaan Penyesuaian Target Kerja

Tanggal: 6 Januari 2025

Sehubungan dengan surat permintaan dari Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, yang mengajukan penyesuaian target kerja untuk triwulan kedua tahun ini, dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia, kami ingin meminta keputusan terkait apakah penyesuaian ini dapat diterima atau perlu solusi lain yang lebih tepat.

Penyesuaian ini diminta karena adanya kendala dalam pemenuhan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Demi efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas, kami memerlukan keputusan apakah penyesuaian target ini dapat diterima atau jika perlu dicari solusi lain, seperti penambahan sumber daya manusia, alokasi ulang pekerjaan, atau opsi lain yang memungkinkan untuk tetap mencapai hasil yang optimal. Kami mengharapkan arahan dari Bapak/Ibu untuk langkah selanjutnya yang dapat diambil.

Setelah keputusan diberikan, kami akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai, termasuk penyesuaian alokasi sumber daya atau metode kerja untuk memastikan pencapaian target yang efisien.

Kami mengharapkan keputusan Bapak/Ibu terkait permintaan penyesuaian target ini. Mohon petunjuk lebih lanjut apakah penyesuaian ini diterima atau jika perlu solusi lain yang lebih tepat. Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini.

Hormat saya,

Ratna Dewi Sari

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur

MEMO

Kepada: Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Daerah X

Dari: Kepala Bidang Keuangan

Perihal: Aduan konflik Antar Divisi

Tanggal: 5 Januari 2025

Saya ingin melaporkan adanya konflik terkait anggaran antara Divisi Keuangan dan Divisi Infrastruktur yang memerlukan perhatian segera. Konflik ini muncul akibat ketidaksepakatan mengenai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional di Divisi Infrastruktur. Permasalahan ini berpotensi menghambat pencapaian target tahunan yang telah disepakati sebelumnya, karena adanya ketidakseimbangan dalam pembagian sumber daya.

Meskipun anggaran telah dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target tahunan, perbedaan pandangan terkait prioritas anggaran di kedua divisi menyebabkan timbulnya ketegangan yang mengancam kelancaran operasional. Sejauh ini, belum ada kesepakatan tentang langkah-langkah penyelesaian, dan perbedaan tersebut semakin memperburuk situasi.

Konflik ini berpotensi menghambat pencapaian target tahunan yang telah ditetapkan. Apabila tidak segera diselesaikan, keterlambatan atau ketidakjelasan dalam alokasi anggaran dapat mengganggu kelancaran proyek-proyek di Divisi Infrastruktur. Hal ini tentu saja dapat menunda pencapaian berbagai tujuan penting yang telah direncanakan untuk tahun ini, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.

Hingga saat ini, belum ada solusi yang konkret untuk menyelesaikan perbedaan anggaran antara kedua divisi. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar diadakan pertemuan langsung antara pihak Divisi Keuangan dan Divisi Infrastruktur untuk membahas permasalahan ini secara terbuka dan konstruktif. Dalam pertemuan tersebut, kita harus mencari solusi yang seimbang, yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan Divisi Infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan Divisi Keuangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Saya percaya bahwa pertemuan yang dipandu oleh prinsip komunikasi yang baik dan saling pengertian akan menghasilkan solusi yang memadai, yang akan memungkinkan kita untuk tetap fokus pada pencapaian target tahunan.

Setelah pertemuan untuk menyelesaikan konflik ini, saya menyarankan agar kita segera melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disepakati dapat mendukung kegiatan yang paling prioritas, serta mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pembentukan tim kecil yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran juga dapat menjadi langkah positif untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target tahunan, saya mohon arahan dan keputusan dari pimpinan untuk mengatasi konflik ini. Kami siap untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Divisi Infrastruktur untuk segera menemukan solusi yang tepat dan efisien.

Hormat saya,
Budi Santoso

Kepala Divisi Keuangan

Kepada: Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Daerah X

Dari: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Perihal: Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan

Tanggal: 14 Januari 2025

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa evaluasi kinerja triwulan pertama telah dilakukan terhadap beberapa unit kerja, yaitu Bidang Infrastruktur, Bidang TI, Bidang Keamanan Data, dan Bidang Komunikasi dan Informasi. Berdasarkan hasil evaluasi kami, beberapa unit kerja belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam beberapa aspek operasional.

Dalam evaluasi ini, kami menemukan beberapa kendala signifikan, termasuk keterlambatan dalam pencapaian target kerja di beberapa unit, insiden kebocoran data yang membutuhkan perhatian segera, serta adanya konflik antar divisi yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja secara keseluruhan. Kami mencatat bahwa temuan ini memerlukan tindak lanjut dan solusi yang tepat untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut.

Analisis awal kami menunjukkan bahwa faktor internal seperti konflik antar divisi menjadi salah satu penyebab utama hambatan kinerja. Sementara itu, faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi belum sepenuhnya teridentifikasi, dan kami merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami tantangan eksternal yang dihadapi oleh unit-unit tersebut.

Kami menyarankan agar langkah perbaikan disusun setelah memperoleh tanggapan dan arahan lebih lanjut dari pihak Direktorat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencakup peningkatan koordinasi antar divisi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda.

Kami mohon arahan dari Bapak/Ibu Direktur Jenderal untuk memberikan panduan yang jelas kepada tim kami dalam menangani isu-isu yang telah kami identifikasi. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap unit memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja mereka.

Kami merekomendasikan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang mencakup evaluasi berkala dan pelaporan rutin tentang kemajuan yang dicapai. Rencana ini akan difokuskan pada pemantauan perbaikan yang dilakukan dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kami berharap agar kesimpulan akhir dan rekomendasi yang lebih komprehensif dapat kami susun setelah menerima masukan dari Direktorat. Tujuan kami adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan di seluruh unit kerja yang kami pantau.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Siti Saribanong

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Kepada Yth.

Bapak Sugeng Abadi (Direktur Jenderal Dinas Perhubungan)

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan motivasi di lingkungan instansi pemerintahan, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Motivasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 3 Februari 2025

Waktu: Pukul 10.00 pagi

Tempat: Aula Universitas X

Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan inspirasi kepada para peserta agar dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja. Dengan tema "Menginspirasi Diri, Menggapai Prestasi", seminar ini akan menghadirkan pembicara terkenal yang telah berkontribusi besar dalam bidang motivasi dan pengembangan diri.

Pembicara Utama:

Dr. Stephanie M.Si, seorang motivator nasional yang telah dikenal luas karena keberhasilannya dalam memotivasi berbagai institusi dan organisasi di seluruh negeri.

Seminar ini terbuka untuk seluruh pegawai di lingkungan instansi pemerintahan. Kami berharap kehadiran Bapak dapat memberikan nilai tambah yang besar dalam pengembangan pribadi dan profesional.

Manfaat Seminar:

Seminar ini dirancang untuk membantu peserta dalam:

- Meningkatkan motivasi kerja dan semangat dalam mencapai target organisasi.
- Mengembangkan keterampilan interpersonal yang mendukung kinerja tim.
- Membangun mentalitas positif dalam menghadapi tantangan kerja.

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara ini untuk bersama-sama mendapatkan manfaat dari wawasan yang akan dibagikan. Tidak perlu melakukan pendaftaran sebelumnya, dan konfirmasi kehadiran tidak diperlukan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dapat menghubungi nomor kontak 0812345678901 (Javier) atau melalui email di seminarmotivasi@gmail.com.

Kami sangat menantikan kehadiran Bapak/Ibu dalam seminar ini. Mari kita bersama-sama menginspirasi diri untuk menggapai prestasi yang lebih tinggi.

Hormat kami,

Panitia Seminar Motivasi

Badan Kepegawaian Daerah X

Kepada: Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Daerah X
Dari: Kepala Bidang Infrastruktur
Perihal: Aduan konflik Antar Divisi

Tanggal: 16 Januari 2025

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya kami dalam mendukung berbagai proyek pembangunan yang dikelola oleh Bidang Infrastruktur, kami memerlukan data statistik sederhana yang relevan untuk analisis dan perencanaan lebih lanjut. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait beberapa aspek operasional dan strategis yang sedang kami kaji.

Kami memahami bahwa permintaan ini bukan merupakan prioritas mendesak, namun kami meyakini bahwa informasi tersebut akan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, kami mengajukan permintaan ini kepada Bapak/Ibu Direktur Jenderal untuk mempertimbangkan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna memperoleh data tersebut. Jika memungkinkan, kami juga bersedia untuk bekerja sama dengan unit lain yang dapat membantu dalam proses pengumpulan data ini.

Kami menyadari pentingnya efisiensi dalam pengelolaan tugas-tugas administratif dan akan sangat menghargai panduan atau saran dari Bapak/Ibu terkait langkah-langkah terbaik yang dapat kami tempuh untuk memenuhi kebutuhan data ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar permintaan ini dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ratna Dewi Sari

Kepala Bidang Infrastruktur